



PENYALAHGUNAAN AKUN NETFLIX OLEH PIHAK KEDUA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹Tatu Afifah*, ²Rai Indah Nurhidayah

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum, Universitas Serang Raya, Serang, Indonesia.

* Corresponding Author: tatu_afifahrachman@gmail.com

ABSTRACT

One of the social media platforms that is currently widely used for buying and renting various objects is the Instagram application. With the large number of products available, including accounts for premium applications like Netflix, there are instances of social media accounts engaging in abuse by selling or renting out premium application programs on Instagram, such as the account named "digprem.store." Based on this phenomenon, the issues in this research are formulated as follows: what is the legality of renting out premium Netflix accounts by a second party through online shop services, and what are the legal consequences of renting out premium Netflix accounts through online shops according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The researcher employs a qualitative method with a normative legal approach. The type of research used is normative research, which involves studying, observing, and analyzing several theoretical aspects. Data collection techniques include interviews and literature studies. The results of this study indicate that online shop services have committed a breach of contract against the provisions set by Netflix in the terms of use under clause 4.2, Article 17, Article 32 paragraphs (1) and (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Article 113 paragraphs (3) and (4), Article 114 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



DOI:

<https://doi.org/10.30656/jhak.v2.i2/11406>

ABSTRAK

Salah satu media sosial yang saat ini banyak dijadikan sebagai tempat proses jual beli atau sewa menyewa suatu objek adalah Aplikasi Instagram. Dengan banyaknya jumlah produk yang tersedia, termasuk akun aplikasi premium netflix. Salah satu contoh akun media sosial yang melakukan penyalahgunaan berupa penjualan atau penyewaan kembali program aplikasi Premium di jejaring sosial Instagram dengan nama akun "digprem.store". Berdasarkan fenomena tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana legalitas penyewaan kembali akun netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop dan akibat hukum dari menyewakan kembali akun netflix premium melalui jasa online shop menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian secara normatif yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah jasa online shop melakukan wanprestasi terhadap ketentuan yang dibuat oleh perusahaan netflix dalam term of use pada nomor 4.2, Pasal 17, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. PENDAHULUAN

Globalisasi informasi telah menjadikan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat informasi global. Perubahan cepat dalam teknologi informasi menuju perkembangan global mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat. Dengan kemudahan teknologi dan informasi, ekspansi, pergerakan, dan arus barang serta jasa lintas batas pada akhirnya menghadirkan beragam produk dan layanan untuk konsumen dalam berbagai bentuk.¹

Jenis barang dan jasa yang saat ini diperdagangkan memiliki hak kekayaan intelektual yang nyata. Kekayaan intelektual ini bersifat tidak berwujud tetapi tetap dianggap ada sebagai kepemilikan atas karya intelektual manusia. Objek dari kekayaan intelektual mencakup karya, ciptaan, produk pemikiran, atau kreativitas manusia. 'Intelekt' berarti bahwa objek dari kekayaan intelektual adalah kecerdasan, metode berpikir, atau produk dari pemikiran manusia (ciptaan dari pikiran manusia). Salah satu bentuk kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Secara umum, hak cipta adalah hak pencipta untuk mengumumkan atau menyetujui karya yang diciptakan tanpa mengurangi batasan dan regulasi hukum yang berlaku. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan manfaat dari karya yang diciptakan, sedangkan hak moral merujuk pada hak yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, bahkan jika hak cipta telah dialihkan.²

Hasil kreativitas, inovasi, dan kekayaan intelektual sesungguhnya terbatas penggunaannya, yakni tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketentuan umum yang berlaku. Meskipun hak cipta diatur dalam undang-undang, namun kecenderungan untuk melanggar atau menyalahgunakan hak cipta menjadi lebih mudah dan lazim di kalangan masyarakat karena dianggap lebih efektif. Faktanya, saat ini kasus pelanggaran hak cipta atas karya yang dilindungi terbilang cukup banyak, mulai dari pelanggaran hak cipta musik, film, buku, gambar, perangkat lunak, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, kasus pelanggaran terhadap keragaman kekayaan intelektual, khususnya dalam hal hak cipta, menduduki peringkat ketiga di dunia. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak cipta, diperlukan adanya upaya hukum yang dapat menjamin perlindungan terhadap karya cipta oleh pencipta. Salah satu

¹ Anishah wulandari et al, Analisis Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional, *Jurnal Manajemen dan Sains*, 8(1), 2023, 1162

² I Nyoman Londra, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Peradaban Masyarakat Bali*, (Surabaya: Unipress Unesa, 2016) hlm. 6

bentuk karya cipta yang wajib dilindungi undang-undang adalah program komputer.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan program komputer sebagai sekumpulan instruksi yang dituangkan dalam bentuk bahasa, kode, format, atau bentuk lain yang dimaksudkan agar komputer dapat menjalankan fungsi untuk menghasilkan suatu hasil tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, aplikasi Netflix termasuk dalam kategori program komputer yang dapat diakses melalui internet. Aplikasi ini merupakan layanan streaming yang menampilkan dan mendistribusikan informasi elektronik berupa email, nama pengguna, dan kata sandi, beserta serial televisi, dokumenter, film, dan lain-lain yang ada di dalamnya.³

Netflix merupakan sebuah teknologi aplikasi streaming film berbayar yang dikembangkan oleh manusia di bidang hiburan yang saat ini banyak digunakan. Pada tahun 1997, berdirilah Netflix, Inc. di Amerika Serikat yang menyediakan layanan berlangganan berupa video on demand yang dapat diakses melalui aplikasi atau situs web Netflix. Aplikasi Netflix dapat diunduh di smartphone, laptop, komputer, bahkan smart TV. Konten video yang disediakan oleh Netflix merupakan kumpulan video orisinal Netflix, acara TV, film, dokumenter pemenang penghargaan, dan lain sebagainya. Tayangan-tayangan tersebut bergenre animasi hingga laga dan tersedia di Netflix, yang tidak ditayangkan di televisi.⁴

Pada dasarnya, perlindungan hak cipta dapat diperoleh dengan terlebih dahulu mendaftarkan merek. sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas merek merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar yang telah memperoleh izin dari Negara dan selanjutnya pemilik merek terdaftar dapat menggunakan merek tersebut dalam kurun waktu tertentu. Netflix telah resmi mendaftarkan mereknya tersebut dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nama perusahaan NETFLIX melalui nomor registrasi IDM000596517 pada tanggal 17-05-2017 dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 30-03-2035.⁵ Perlindungan Hak Cipta bersifat teritorial atau mengikuti ketentuan hukum negara atau wilayah hukum dimana suatu karya cipta tersebut akan digunakan. Dengan telah didaftarkanya merek tersebut, Netflix akan mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan

³ *Ibid*, hlm. 11

⁴ Ramon Lobato, *Netflix Nations*, (New York : New York University Press, 2019) hlm. 19-43

⁵ Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) www.pdk-indonesia.dgip.go.id, diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 19.00 WIB

karya cipta lain yang telah didaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain berdasarkan ketentuan pendaftaran atas merek. Status hukum terbaru Netflix di Indonesia juga diperkuat dengan terdافتarnya perusahaan Netflix dengan nomor pendaftaran 004825.02/DJAI.PSE/01/2024 ke dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat memberikan legalitas bagi perusahaan Asing yang menjalankan bisnis dengan kategori digital di Indonesia.⁶

Netflix sebagai sebuah karya intelektual tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena Netflix merupakan karya intelektual yang disusun dari Kumpulan dokumen dan/atau informasi elektronik dan Netflix merupakan karya intelektual yang dapat diakses melalui internet. Maka, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Netflix juga termasuk dalam sistem elektronik yang berfungsi untuk menampilkan, mengumumkan, dan menyebarkan informasi elektronik berupa email, nama pengguna, dan kata sandi pada akun Netflix, beserta kumpulan karya film yang ada di dalamnya.

Netflix sebagai penyedia layanan *video on demand* berlangganan merupakan platform idaman untuk streaming film, mayoritas saat ini tidak sedikit orang yang ragu untuk menonton film secara langsung di bioskop karena dana yang kurang serta akses yang cukup rumit dan memakan waktu untuk sampai ke lokasi bioskop. Dengan adanya Netflix, banyak orang yang memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan akun Netflix dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga resmi yang ada di aplikasi. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyewakan Kembali akun Netflix yang mereka beli dengan harga *official store*. Jika dibandingkan dengan kisaran harga aslinya, penyedia akun Netflix menawarkan akun dengan selisih harga yang berbeda dari harga resminya dengan tujuan untuk menarik minat konsumen karena harganya yang cukup jauh berbeda.

Pihak kedua yang menyewakan akun Netflix premium dengan harga murah juga merupakan pelanggan Netflix. Oleh karena itu, mereka dianggap melanggar syarat dan ketentuan sebagai pengguna Netflix karena menyewakan profil untuk tujuan komersial dan mencari keuntungan. Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, transaksi yang sebelumnya hanya dilakukan secara tatap muka pun

⁶ <https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/17412>, diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 13.00 WIB

berkembang menjadi transaksi daring. Dampak dari kemajuan teknologi dan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia yakni munculnya sistem transaksi daring dalam proses jual beli atau sewa melalui media sosial. Transaksi daring dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan dengan mudah di mana saja dan kapan saja hanya melalui smartphone. Salah satu media sosial yang banyak digunakan sebagai wadah proses jual beli atau sewa adalah aplikasi Instagram. Pembeli dan penjual memanfaatkan laman internet dalam proses transaksinya yang lebih singkat, cepat dan efisien serta ragam objek yang ditawarkan lebih bervariasi salah satunya akun Netflix premium.⁷

Salah satu contoh akun media sosial yang melakukan penyewaan program aplikasi Netflix Premium di jejaring sosial Instagram dengan nama akun “digprem.store” menyewakan aplikasi-aplikasi berbayar dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan secara resmi dari pihak aplikasi terkait. Akun ini jelas tidak termasuk sebagai penjual resmi karena pihak Netflix sendiri hanya menawarkan layanan aplikasi mereka melalui toko media digital resmi seperti App Store dan Play Store. Pada online shop tersebut, harga Netflix premium yang ditawarkan mulai dari Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 bulan berlangganan dengan akun sharing atau akun yang digunakan lebih dari satu orang, sedangkan untuk paket berlangganan selama 1 bulan dengan akun private atau akun yang digunakan secara pribadi diberi harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan keunggulan bisa diakses diberbagai perangkat seperti handphone, tablet, laptop hingga televisi. Konsumen kemudian dapat memilih jenis langganan yang ditawarkan oleh penjual dan setelah pembayaran selesai, pemilik akun @digprem.store atau penjual akan mengirimkan email dan password melalui aplikasi pesan atau whatsapps pribadi pembeli untuk bisa login dan mengakses layanan Netflix sesuai masa berlakunya. Harga yang ditawarkan jelas berbeda jauh dengan Netflix premium yang didapatkan secara resmi dengan harga paling rendah yakni Rp 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) untuk berlangganan selama 1 bulan yang hanya bisa diakses melalui handphone.⁸

Kegiatan yang dilakukan oleh pemilik akun @digprem.store ini dinilai

⁷ About Netflix, Netflix Official Website, <https://media.netflix.com/en/about-netflix> diakses pada tanggal 17 April 2025.

⁸ Instagram, digprem.store <https://www.instagram.com/digprem.store> di akses pada tanggal 18 April 2025.

sebagai transaksi ilegal atas penyewaan akun Netflix karena penyewa sendiri tidak memperoleh lisensi secara resmi dalam meraih keuntungan serta membuat pemegang lisensi hak cipta tidak memperoleh hak ekonomi atas kegiatan dengan tujuan komersil tersebut. Ketentuan larangan sewa menyewa secara tidak resmi tersebut juga telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Pemilik akun @digprem.store di media sosial tersebut dinilai dengan sengaja menyewakan dan mendistribusikan akun Netflix sebagai Dokumen Elektronik kepada pihak ketiga. Tidak hanya itu, penjual juga melanggar ketentuan penggunaan Netflix yang menegaskan bahwa penggunaan bersifat personal dan hanya boleh digunakan untuk keperluan secara pribadi dan tidak disebarluaskan kepada pihak ketiga maupun untuk tujuan komersial.

Berdasarkan latar belakang yang diambil oleh penulis, penelitian ini akan mengkaji bagaimana legalitas penyewaan akun Netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop dan akibat hukum dari menyewakan kembali akun Netflix premium melalui jasa online shop menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mempertimbangkan dan menelaah beberapa permasalahan teoritis terkait dengan asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu analisis hukum terhadap penyalahgunaan akun Netflix premium oleh pihak kedua di media sosial.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder. Penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, oleh karena itu diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi, dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang menjadi sumber informasi utama dan menggunakan data primer sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder adalah data yang meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan, dan lain sebagainya

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengunduh dan mengumpulkan/mengoleksi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen atau

tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan wawancara kepada pihak online shop/ pemilik akun @digprem.store melalui aplikasi Whatsapp

Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif untuk analisis data, dengan hasil akhir berupa kata-kata, bukan angka. Analisis data kualitatif tidak melibatkan perhitungan manual atau uraian yang komprehensif, dan pengembangan semua masalah yang diteliti disajikan dalam bentuk uraian. Masalah-masalah tersebut dipelajari secara rinci dan kemudian dirangkum dalam bentuk uraian.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penyewaan account Netflix di Media Sosial instagram @digprem.store

Media sosial yang paling banyak diminati untuk melakukan transaksi jual beli atau sewa menyewa adalah Instagram, karena para penjual di Instagram dapat dengan bebas mempromosikan produknya tanpa ada batasan apa pun. Instagram merupakan media sosial yang sering digunakan untuk membagikan foto dan video, sehingga produk yang akan dijual hanya perlu mengambil foto, mengunggahnya dan memberikan deskripsi sesuai dengan ketentuan produk yang dipromosikan.¹⁰

Hal-hal seperti yang telah dikemukakan di atas menjadi latar belakang munculnya jual beli atau penyewaan aplikasi android dan salah satunya penyewaan Account Netflix. Maka dari itu saat ini tidak sulit untuk menemukan toko online yang menyediakan akun Netflix yang siap pakai namun tidak resmi di berbagai media sosial. Salah satunya adalah di akun Instagram @digprem.store yang saat ini masih melakukan aktivitas penyewaan aplikasi premium di Instagram. Kegiatan penyewaan suatu objek di media sosial memang bukanlah suatu kegiatan yang dilarang, namun bisa menjadi tindakan yang tidak baik apabila objek yang disewa bukan merupakan akun aplikasi resmi, melainkan merupakan hasil pelanggaran hak cipta (crack) yang dapat menimbulkan

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 205-243.

¹⁰ Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan). (2022). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211-232. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>

kerugian bagi pemilik asli aplikasi.¹¹



Gambar 1 Logo dan akun instagramonline shop @digprem.store

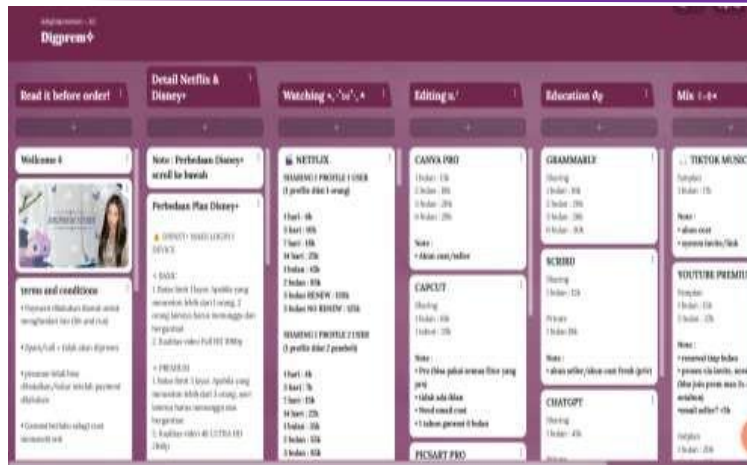
Sumber : Akun Instagram @digprem.store

Dari hasil wawancara yang didapatkan penulis dengan pihak kedua (pemilik jasa online shop @digprem.store Viviana Aulya) mengungkapkan alasan menyewakan kembali berbagai aplikasi premium terutama Netflix ialah untuk memberi kemudahan bagi banyak orang dalam mengakses film-film (layanan-layanan) premium, dengan biaya yang terjangkau dari biaya resmi yang disediakan oleh layanan aplikasi terkait.

Berdasarkan praktik langsung yang dilakukan oleh penulis, proses penyewaan account Netflix di Media Sosial instagram @digprem.store meliputi :

1. Pertama penulis menghubungi pihak kedua (online shop) melalui pesan whatsapps. Lalu pihak kedua mengarahkan peneliti ke link <https://padlet.com/ddigitalpremium/padlet-avraurfe60qct27x> guna mengetahui beragam macam paket yang ditawarkan oleh pihak kedua, yakni sebagai berikut :

¹¹ Berliana Tamara Putri et al, Penerapan Digital Iproline : Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 No 12, 2023, 2894

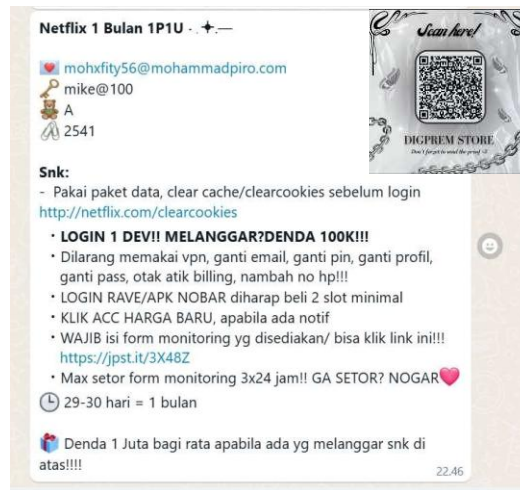


Gambar 2 list harga semua aplikasi di @digprem.store

Sumber : <https://padlet.com/ddigitalpremium/padlet-avraurfe60qct27x>

2. Dengan beragamnya harga dan jangka waktu penggunaan yang ditawarkan, pihak kedua meminta penulis untuk memilih jenis paket yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan penulis (konsumen). Lalu jika sudah memilih paket yang dipesan, pihak kedua akan mengirimkan barcode / QRIS sebagai media untuk berproses transaksi/pembayaran. Untuk proses transaksi hanya bisa melalui QRIS, bank BCA, shopeepay, dana. Setelah penulis melakukan pembayaran dan memberi konfirmasi kembali kepada pihak kedua. Jika proses transaksi berhasil dan telah di cek oleh yang bersangkutan, pihak kedua mengirimkan pesan broadcast yang berisi email, password, link untuk proses login ke aplikasi serta beberapa aturan dalam penggunaan akun Netflix premium yang disewakan.¹²

¹² Wawancara dengan pemilik akun online shop @digprem.store 18 April 2025



Gambar 3 S&K dan barcode pembayaran setiap pembelian aplikasi di @digprem.store Sumber : diambil oleh penulis

2. Legalitas penyewaan akun Netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan hukum penyewaan akun Netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses transaksi elektronik dalam hal penyewaan akun Netflix premium oleh pihak kedua kepada pihak ketiga terindikasi bertentangan dengan Ketentuan bertransaksi secara elektronik yang diantaranya diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- 1) Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.
- 2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam proses sewa menyewa akun premium Netflix ini tidak memiliki niat baik. Online shop atau pihak kedua melanggar ketentuan layanan berbayar Netflix, yang menyatakan bahwa layanan premium Netflix tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial.

Selain itu di dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur beberapa cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang terkait dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik, yakni :

- 1) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak

Maka berdasarkan beberapa poin yang sudah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaan penyewaan akun Netflix premium yang dilakukan oleh online shop atau pihak kedua, sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dimana Pihak online shop disini menyewakan akun Netflix premium kepada orang lain yang tidak membeli langsung kepada pihak perusahaan netflix. Pihak online shop juga memasukkan akun orang lain kedalam akun keluarga milik online shop yang sebenarnya hanya boleh diakses bagi orang-orang yang berada dalam satu rumah atau alamat yang sama.¹³

Ketentuan hukum jual beli akun Netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak kepemilikan mutlak atas suatu karya yang diberikan kepada pemilik hak cipta, atau dalam hal ini sang pencipta, telah mengolah pikirannya untuk memunculkan suatu ide dan mengerahkan daya serta upaya untuk bereksperimen lalu menciptakan karya yang kreatif. Pembajakan dan pendistribusian barang hasil pelanggaran hak cipta sudah disebutkan secara

¹³ <https://help.netflix.com/legal/termsfuse> diakses pada tanggal 18 April 2025

rinci dalam ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi:

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dan juga, selain mengatur tentang pembajakan dan pendistribusian, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelola tempat perdagangan yang mana dilarang untuk melakukan jual beli barang dari hasil pelanggaran hak cipta seperti yang diatur dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”¹⁴

Mendistribusikan produk bajakan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga ini adalah perbuatan yang menentang undang-undang. Bentuk kerugian yang dimaksud yakni diantaranya:¹⁴

1. Pembajak tidak menyadari dan tidak menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karya dengan menghabiskan waktu, tenaga dan dana.
2. Pembajak tidak mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesastraan dan kesenian.
3. Pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau perusahaan yang

¹⁴ Rahayu Mardikaningsih et al, Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan, Jurnal Begawan Hukum, Vol.2 No 1, 2024, 291-293

dengan penuh resiko menyediakan modal untuk menyiarkan, mencetak dan memperbanyak karya cipta tersebut. Lebih dari itu perusahaan harus membayar berbagai pajak dan royalty. Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka tidak membayar pajak dan royalty dari barang bajakannya tersebut, sehingga selain merugikan pencipta dan perusahaan, pembajak telah merugikan negara

3. Akibat hukum dari menjual kembali akun Netflix premium oleh pihak kedua melalui jasa online shop

Berdasarkan kasus jual beli netflix premium oleh online shop di media sosial, pihak online shop telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan layanan berbayar netflix. Adapun persyaratan layanan berbayar ini merupakan perjanjian yang mengikat (*Term of Use*) antara pihak netflix dengan pihak online shop yang telah melakukan pembelian netflix premium. Secara lengkap perjanjian tersebut dapat dilihat melalui website resmi netflix di <https://help.Netflix.com/legal/termsfuse>. Salah satu ketentuan *Term of Use* pada Nomor 4.2 menegaskan sebagai berikut :

“Layanan Netflix dan konten apapun yang ditonton melalui layanan tersebut hanya ditujukan untuk penggunaan secara pribadi dan non- komersial oleh Anda dan tidak dapat digunakan bersama orang-orang di luar rumah tangga Anda. Selama keanggotaan Netflix Anda, kami memberi Anda suatu hak yang terbatas, non-eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut di atas, tidak ada hak atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum.”¹⁵

Dari keterangan diatas dapat dinyatakan, dalam penjualan akun Netflix premium ini, pihak online shop telah melakukan wanprestasi dimana dalam persyaratan langganan berbayar terkait. Dalam hal ini pihak online shop telah melanggar dengan membagikan akun netflix premium yang dibelinya kepada orang lain. Dia membagikan baik akun dan sandi akun kepada orang yang tidak mengakses layanan berbayar yang dipesan langsung ke pihak resmi (netflix).

¹⁵ <https://help.netflix.com/legal/termsfuse> diakses pada tanggal 19 April 2025

Dilansir dari laman forbes.com Pihak Netflix sendiri sudah melakukan upaya kecil sebagai Langkah awal dalam mengatasi permasalahan jual beli atau penyewaan akun aplikasi netflix premium yakni dengan melakukan pemblokiran terhadap akun netflix pihak kedua (online shop) jika terdeteksi adanya banyak perangkat yang tersambung ke akunnya atau pihak online shop terdeteksi melanggar *term of use* yang sudah disepakati.¹⁶

Namun hal ini dirasa masih kurang efektif, karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik jasa online shop @digprem.store mengungkapkan bahwa pernah mengalami pemblokiran atau penangguhan akun oleh pihak netflix karena terdeteksi melanggar *term of use* yang sudah disediakan netflix. Tapi hal ini bisa diatasi dengan penjual melakukan manipulasi laporan permasalahan kepada pihak netflix melalui email, dan pihak Netflix dapat mengkonfirmasi lalu akun netflix pihak kedua akan pulih kembali dalam beberapa hari.¹⁷ Karena adanya wanprestasi dalam proses penyewaan akun netflix premium melalui pihak kedua atau online shop, menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur litigasi, yakni pengadilan atau non-litigasi, yakni arbitrase, maka kaidah wanprestasi tidak hanya berlaku untuk transaksi secara umum, tetapi juga untuk transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti penjualan akun netflix premium. Jika menyangkut perdagangan lintas negara, hal ini berkaitan langsung dengan yurisdiksi negara terkait (Indonesia).

Penyelesaian sengketa e-commerce merupakan masalah yang relevan bagi dunia usaha digital. Hal ini berpotensi untuk dapat diselesaikan dengan cepat, efisien, adil, murah, dan tidak memakan banyak waktu. Penyelesaian sengketa e-commerce dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, yaitu melalui:

- a. Proses Ajudikasi, yang meliputi peradilan dan arbitrase
- b. Proses Konsensus, yang meliputi Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Dari kedua mekanisme tersebut, dimungkinkan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase. Hal ini dikarenakan proses yang ditawarkan oleh arbitrase dapat memberikan penyelesaian perkara yang cepat dan adil. Apabila menggunakan lembaga

¹⁶ Dilansir dari laman, <https://www-forbescom.translate.google/sites/kateoflahertyuk/2023/02/09/netflix-password-sharing-everything-you-need-to-know/? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sge>. Di akses pada tanggal 20 November 2024

¹⁷ Wawancara dengan pemilik akun online shop @digprem.store 18 April 2025

peradilan, terdapat beberapa kelemahan, yaitu penyelesaian sengketa yang lambat, biaya litigasi yang mahal karena penyelesaian yang lama, lembaga peradilan yang kurang tanggap, putusan pengadilan yang kurang mampu menyelesaikan permasalahan, dan kompetensi hakim yang bersifat umum.¹⁸

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) akibat wanprestasi yang dilakukan pihak kedua (online shop) atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian (*term of use netflix*), dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pertama (perusahaan Netflix/ pelaku usaha) atau pihak yang mempunyai hak menerima dalam hal pihak kedua atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan prestasi, dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratis dalam Pasal 1267 jis 1266 KUHPperdata, yakni :

- a. Pelaksanaan perjanjian;
- b. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pemutusan kontrak perjanjian;
- e. Pemutusan kontrak perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Selain itu, menurut KUHPperdata akibat wanprestasi yang dilakukan pihak kedua (online shop) yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan netflix yang mempunyai hak menerima prestasi.¹⁹ Akibat hukum bagi pihak kedua (online shop) yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Pihak kedua harus membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak perusahaan netflix yang mempunyai hak menerima prestasi (Pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Pihak kedua harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan

¹⁸ Nur Kholis, Rommy Hardyansyah, Penyelesaian Sengketa Jual Beli Berbasis E-Commerce, Jurnal IUS, Vol.XII No 02, 2024, 157-158

¹⁹ Sudjana, Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi. (2019). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 93-106. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i01.694>

- pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Pihak kedua harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata)
 - d. Pihak kedua harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa penyewaan kembali akun netflix premium oleh pihak kedua di media sosial merupakan perbuatan yang melanggar beberapa aturan diantaranya : wanprestasi terhadap ketentuan yang dibuat oleh perusahaan netflix dalam term of use pada nomor 4.2, Pasal 17, Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akibat hukum yang terjadi dari permasalahan ini ialah wanprestasi terhadap perjanjian antara pihak kedua dengan perusahaan Netflix, sehingga penyelesaian sengketa ecommerce dapat di tempuh melalui proses adjudikasi (peradilan dan arbitrase) dan proses konsensus (negosiasi, mediasi, konsiliasi). Dan menurut Pasal 1267 jis 1266 dan beberapa pasal lain yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) beberapa akibat hukum bagi pihak kedua yang melakukan wanprestasi, yaitu : Pelaksanaan perjanjian, ganti kerugian, pemutusan kontrak, dan peralihan resiko. Berdasarkan dari penelitian permasalahan penyewaan akun netflix oleh pihak kedua penulis dapat memberikan saran agar perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat serta peran penting dari pemerintah agar lebih bijak dalam menggunakan suatu produk digital sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain dan pihak netflix diharapkan dapat lebih teliti dan dapat memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang terdeteksi melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap produk ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anishah wulandari et al, Analisis Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional, Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 2023, 1162
- Berliana Tamara Putri et al, Penerapan Digital Iproline : Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 2 No 12, 2023, 2894
- I Nyoman Londra, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Peradaban Masyarakat Bali, (Surabaya: Unipress Unesa, 2016)

Nur Kholis, Rommy Hardyansyah, Penyelesaian Sengketa Jual Beli Berbasis E-Commerce, *Jurnal IUS*, Vol.XII No 02, 2024, 157-158

Rahayu Mardikaningsih et al, Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan, *Jurnal Begawan Hukum*, Vol.2 No 1, 2024, 291-293

Ramon Lobato, *Netflix Nations*, (New York : New York University Press, 2019) hlm. 19-43

Sudjana, Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi. (2019). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 93-106. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i01.694>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 205-243

Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital: (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan). (2022). *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 211-232. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.5469>

